

STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGURANGI ANGKA KEMISKINAN DI KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN

Imam Muammar Khatam

NPP. 29.1385

*Asdaf Kabupaten Bulukumba , Provinsi Sulawesi Selatan
Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik*

Email: imammuammar88@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): Poverty is a social problem that currently needs to be considered in various parts of the country, although in this case there may be some countries that have low poverty levels. This is in accordance with the 1945 Constitution article 34 paragraph 1 which reads that the poor and neglected children are cared for by the state. The government in this case has an effort to overcome this and it has been regulated in Law Number 13 of 2011 concerning the Poor. **Purpose:** This study was conducted to determine the strategy used through supporting factors and inhibiting factors, as well as the right strategy to be used through the formulation of strategy in reducing poverty in Gowa Regency. **Methods:** This research was conducted using a qualitative descriptive method and an inductive approach. Determination of research subjects was carried out using purposive sampling technique and the data sources in this study using data collection methods used were observation, interviews and documentation. This study uses an analysis of the analytical techniques used by researchers in the form of data reduction, data presentation, and drawing conclusions based on the SWOT theory analysis proposed by Freddy Rangkuti (2014: 19). **Results:** The results of this study indicate that the government's strategy in reducing poverty is by making policies by emphasizing employment and helping medium-sized businesses so that people's per capita incomes can increase the government also emphasizes the importance of advances in information and technology that can provide effectiveness and efficiency in profession. The obstacle encountered is that the community has not been able to complete the requirements for factors supporting the existence of foreign investors opening up more job opportunities. The efforts made by the Gowa Regency Social Service in distributing Cash Social Assistance are some of the current government's efforts with capital loans to business training from the government with local government supervision, then the government is developing a cultural village as an attraction for foreign investors, there are areas designated by the government to be explored. wake up as a cultural village it can open up jobs and show the culture of Gowa Regency. Currently, the Cimory is also being built, a collaborative effort between the local government and the Cimory, which is located in the highlands, with the provision that around 70 percent of the total workers are the people of Gowa Regency. **Conclusion:.** It can be concluded that the strategies used to reduce poverty in the regions are the government's efforts to issue policies governing the creation of wide employment opportunities as well as capital loans and training to assist medium-sized enterprises in the community.

Keywords: Poverty, Economic Development, SWOT Analysis, Government Policy

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kemiskinan ialah masalah sosial yang saat ini termasuk hal yang sangat perlu diperhatikan diberbagai belahan Negara, meskipun dalam hal ini mungkin ada dari beberapa negara yang memiliki tingkat kemiskinan rendah. Hal ini sesuai dalam Undang-Undang 1945 pasal 34 ayat 1 yang berbunyi Fakir Miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Pemerintah dalam hal ini memiliki upaya untuk menanggulangi hal tersebut dan telah diatur didalam Undangundang Nomor 13 tahun 2011 tentang Fakir miskin. **Tujuan:** Penelitian ini dilakukan untuk untuk mengetahui strategi yang digunakan melalui faktor pendukung dan faktor penghambat, serta strategi yang tepat untuk digunakan melalui perumusan strategi dalam mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Gowa. **Metode:** Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif serta pendekatan induktif. Penentuan subjek penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling serta sumber data dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis teknik analisis yang digunakan oleh peneliti berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan analisis teori SWOT yang dikemukakan oleh Freddy Rangkuti (2014:19). **Hasil/Temuan:** Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Strategi pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan dengan membuat kebijakan dengan menekankan lapangan pekerjaan dan membantu usaha menengah sehingga pendapatan perkapita masyarakat dapat meningkat pemerintah juga menekankan akan pentingnya kemajuan informasi dan teknologi hal tersebut dapat memberi efektivitas dan efisiensi dalam pekerjaan. Hambatan yang ditemui yaitu masyarakat belum bisa melengkapi persyaratan faktor pendukung adanya investor asing membuka lapangan kerja yang lebih banyak. Upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Gowa dalam mendistribusikan Bantuan Sosial Tunai beberapa upaya pemerintah saat ini dengan Pinjaman modal hingga pelatihan usaha dari pemerintah dengan pengawasan pemerintah daerah selanjutnya pemerintah sedang mengembangkan desa budaya sebagai daya Tarik investor asing terdapat wilayah yang di tunjuk oleh pemerintah yang akan di bangun sebagai desa budaya hal tersebut dapat membuka lapangan kerja serta menampilkan budaya Kabupaten Gowa. Saat ini juga sedang dibangun cimory upaya kerja sama pemerintah daerah dengan pihak cimory yang terletak di dataran tinggi dengan ketentuan para pekerja sekitar 70 persen dari keseluruhan pekerja adalah masyarakat Kabupaten Gowa. **Kesimpulan:** Dapat disimpulkan bahwa strategi yang digunakan untuk mengurangi angka kemiskinan di daerah ialah beberapa upaya pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan mengatur tentang pembukaan lapangan pekerjaan secara luas serta pinjaman modal dan pelatihan guna membantu usaha menengah di masyarakat.

Kata kunci: Kemiskinan, Perkembangan Ekonomi, Analisis SWOT, Kebijakan Pemerintah

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang penting dan perlu diperhatikan di berbagai belahan Negara, meskipun dalam hal ini mungkin ada dari beberapa Negara yang tingkat kemiskinannya termasuk rendah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang 1945 pasal 34 ayat 1 yang berbunyi Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Dalam penjelasannya kata fakir ialah orang yang tidak mampu untuk berusaha dalam memenuhi kebutuhan dasarnya namun dalam usahanya tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Sehubungan dengan itu Pemerintah akhirnya mengeluarkan aturan mengenai penanggulangan serta solusi bagi penduduk rakyat miskin, hal

tersebut diatur didalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir miskin. Penanggulangan mengenai kemiskinan dilatar belakangi tentang adanya informasi bahwa masalah tersebut ialah masalah yang memiliki tingkat kesulitan yang termasuk sulit dalam mengatasinya, yang memiliki keterkaitan atau hubungan terhadap beberapa aspek di dalamnya dari sosial, ekonomi, budaya dan lainnya. Secara umum tentang masalah ini yang ada harus segera dituntaskan, dalam upaya penanggulangan masalah tersebut memiliki berbagai macam strategi dalam mengurangi dan menekan angka kenaikannya.

Pembengkakan jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan lebih dari setengah nya adalah pedesaan. Namun, beda dengan perkotaan yang dimana justru mengalami penurunan baik jumlah juga persentase masyarakat miskinnya, daerah pedesaan malah mengalami kenaikan total persentase masyarakat miskin. Yang berakibat proporsi masyarakat miskin dalam desa terlihat nampak semakin tinggi yang besar secara implisit fakta ini menjelaskan ialah masyarakat miskin di daerah tersebut kurang memiliki manfaat dalam kenaikan tingkat ekonomi dalam pencapaian provinsi Sulawesi Selatan. Berbagai aspek terdapat satu yang mendukung kebijakan dalam menyelesaikan masalah kemiskinan ini ialah terdapatnya beberapa data yang akuntabel dan tepat. Pengukuran angka masyarakat miskin ini menjadi suatu hal yang sangat terpercaya dapat dijadikan instrumen kuat bagi pengambil kebijakan untuk lebih memperhatikan tentang kebutuhan dasar hidup masyarakat miskin. Juga data ini penting kedepannya agar menjadi pertimbangan kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan masalah kemiskinan dan agar memberikan target dan tujuan pada masyarakat miskin agar memperbaiki kondisi kehidupan kedepannya

Daerah yang menjadi fokus utama dari masyarakat miskin di Sulawesi Selatan ialah kabupaten Pangkep, Jeneponto, Bone, Toraja Utara, Luwu Utara, Luwu dan Maros. Hampir sebagian dari masyarakat miskin di Sulawesi Selatan bertempat tinggal di wilayah tersebut. Secara umum daerah ini memiliki presentase masyarakat miskin termasuk tinggi, dimana daerah ini presentase penduduk miskin diatas 14 persen dari total keseluruhan penduduk. Makassar dan Gowa memiliki masyarakat miskin yang masuk kedalam kategori tinggi atau besar, namun relatif kecil. Namun, setelah diamati kedepan mengenai wilayah kota sampai desa, terlihat jelas wilayah pedesaan merupakan tempat tinggal sebagian penduduk miskin lain ialah mencapai 84,01 persen dari total penduduk miskin dalam artian, setiap 10 orang penduduk miskin provinsi ini, lebih dari 8 orang bertempat tinggal di desa. Presentase penduduk miskin di desa juga termasuk cukup tinggi ialah mencapai 13,63 persen dari total penduduk disana. Jika kita bandingkan dengan kota yang hanya tercatat angka 4,48 persen.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang belanja bantuan sosial pada Kementerian Negara/Lembaga ialah pengeluaran berupa transfer uang, barang maupun jasa yang bersumber dari Pemerintah yang bertujuan dalam membantu kondisi masyarakat miskin dan melindungi masyarakat dari terjadinya risiko sosial, memberikan peningkatan kemampuan ekonomi maupun kesejahteraan seluruhnya. Bantuan sosial merupakan salah satu jenis belanja yang dimana banyak pihak terkait. Dalam hal tersebut mengapa hal tersebut memiliki peran yang penting bagi pemerintah agar supaya terciptanya transparansi dan dapat bertanggungjawab dalam proses pengelolannya, mulai dari tahap penganggaran hingga pada proses evaluasi juga monitoring harus dilakukan dengan akuntabel sehingga masyarakat lebih mengerti mengenai bentuk penggunaan belanja bantuan sosial yang ditangani langsung oleh Pemerintah tersebut. Strategi Pemerintah pusat dalam menangani kenaikan kemiskinan ialah salah satunya memberikan Bantuan Sosial Tunai (BST) yang dianggarkan oleh APBN diserahkan tanggungjawab kepada setiap daerah masing-masing. Namun Dalam penyalurannya ada beberapa permasalahan atau kendala yang dimana

kendala tersebut mengenai transparansi juga tentang tidak meratanya pembagian bantuan ini pada penduduk sehingga terdapat penduduk yang masuk dalam kategori mampu namun menerima bantuan dari pemerintah.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Berdasarkan jurnal dari Koranpangkep.co.id bahwa dari angka kemiskinan di beberapa kabupaten menurun sekitar 1,04 persen dibandingkan tiap tahun 2018 lalu yang berkisar sekitar 15,10 persen. Hal ini diungkap langsung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel, berdasarkan dari hasil persentase data kemiskinan di 24 kabupaten serta kota ini. Langsung di umumkan dalam rapat koordinasi yang dimana dilakukan dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Sulsel, yang di pimpin langsung oleh pimpinan di kantor Gubernur Sulsel, Senin (9/12/2019). Sumber data berasal dari jurnal perumusan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan provinsi Sulawesi Selatan. Pembengkakan jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan lebih dari setengah nya adalah pedesaan. Namun, beda dengan perkotaan yang dimana justru mengalami penurunan baik jumlah juga persentase masyarakat miskinnya, daerah pedesaan malah mengalami kenaikan total persentase masyarakat miskin. Yang berakibat proporsi masyarakat miskin dalam desa terlihat nampak semakin tinggi yang besar secara implisit fakta ini menjelaskan ialah masyarakat miskin di daerah tersebut kurang memiliki manfaat dalam kenaikan tingkat ekonomi dalam pencapaian provinsi Sulawesi Selatan. Khususnya kabupaten Gowa memiliki belanja pendidikan semakin meningkat tiap waktu. Pertumbuhan ini justru melambat dari data dua tahun terakhir semakin menurun tepatnya tahun 2015 dan 2016. Peningkatan belanja tersebut memang meningkat, tetapi juga persentase penduduk miskin tidak adanya perubahan yang signifikan dalam waktu tiga tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Gowa menampakkan kondisi baik meskipun dalam keadaan di tengah pandemi Covid-19 dan juga dalam wilayah tersebut sebelumnya termasuk dalam daerah penularan, selain Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Pemerintah Kabupaten Gowa berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi wilayah agar wilayah tersebut mengalami kestabilan ekonomi. Menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi dalam beberapa wilayah di masa pandemic dalam pantauan aktif ialah sekitar 1,76 persen. Namun, Provinsi Sulawesi Selatan berada dalam minus 0,70 persen. Dalam hal ini beberapa aspek dalam mencapai keberhasilan tersebut memberikan hasil dalam pertumbuhan ekonomi tetap positif. Awalnya penghasilan perkapita di Kabupaten Gowa terus meningkat, dimana pada 2019 dapat tercapai ialah sebanyak Rp 27,10 juta dan pada 2020 mengalami peningkatan 1,29 persen. Dalam mengatasi berbagai masalah dalam segi ekonomi, maka Pemerintah berhasil membuat suatu kebijakan Penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat Indonesia. Bantuan tersebut ialah penyaluran bantuan berupa uang/barang dari pemerintah kepada masyarakat yang dimana tidak secara terus menerus dan selektif dalam tujuannya agar masyarakat terhindar dari kemiskinan dan risiko sosial.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu dalam Strategi pemerintah daerah dalam mengurangi angka kemiskinan di kabupaten Goa Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian Ahmad Soleh (2018) yang berjudul Analisis dan strategi pengentasan kemiskinan di Provinsi Jambi (Soleh :2018) menemukan bahwa Pemerintah daerah memberi peran penting pada BAPPEDA sebagai pelaksanaan dan perencana pembangunan juga sebagai pelimpahan wewenang dalam pengentasan kemiskinan di daerah tersebut juga di sebut dapur pemerintah (Soleh :2018).

Penelitian Putri Rahmadani (2021) yang berjudul Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Kemiskinan Melalui Program Kota Tanpa Kumuh Di Kota Bima (Rahmadani :2021) hasil penelitian dapat menggambarkan sebaran kawasan kumuh yang nantinya dapat membantu pemerintah dan stakeholder terkait dalam mengambil keputusan guna merencanakan penataan kawasan perumahan dan permukiman kumuh (Rahmadani :2021). Penelitian Wulan Budiningsih (2019) yang berjudul Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Dana Desa Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Budiningsih:2019) menemukan bahwa strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Melung melalui pemberdayaan masyarakat dengan adanya dana desa mampu mengatasi kemiskinan yang ada di Desa Melung, karena menyerap tenaga kerja, mengadakan pelatihan yang berdampak pada masyarakat produktif, dan membuat unit wisata, yang bisa menyokong pendapatan asli desa (Budiningsih:2019).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Strategi pemerintah daerah dalam mengurangi angka kemiskinan di kabupaten Goa Provinsi Sumatera Selatan berbeda dengan penelitian Soleh, Rahmadani, dan Budiningsih. Selain itu penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni analisis strategi teori berdasarkan analisis teori SWOT yang dikemukakan oleh Freddy Rangkuti (2014:19).

1.5. Tujuan.

Penelitian ini dilakukan untuk untuk mengetahui strategi yang digunakan melalui faktor pendukung dan faktor penghambat, serta strategi yang tepat untuk digunakan melalui perumusan strategi dalam mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Gowa.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif juga berbeda dengan penelitian dan menganalisis data melalui reduksi data, data display/ penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Conclusion Drawing atau Verification). Data diperoleh dengan teknik Triangulasi data yaitu menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data wawancara dengan teknik purposive sampling terhadap 16 informan yang terdiri dari Sekda Kabupaten Gowa, Kadis Sosial, Kabid Perlindungan dan jaminan sosial, Kabid Pemberdayaan sosial, Kasi Jaminan sosial, tokoh masyarakat dan toko agama. Penelitian ini menggunakan analisis teori analisis teori analisis teori strategi berdasarkan analisis teori SWOT yang dikemukakan oleh Freddy Rangkuti (2014:19).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis yakni Strategi pemerintah daerah dalam mengurangi angka kemiskinan di kabupaten Goa Provinsi Sumatera Selatan Penelitian ini menggunakan analisis teori analisis teori strategi berdasarkan analisis teori SWOT yang dikemukakan oleh Freddy Rangkuti (2014:19). Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Kekuatan (Strenght)

Penulis melakukan pengukuran kekuatan Dinas Sosial dalam mengurangi angka kemiskinan. Berdasarkan hasil penelitian dan terdapat beberapa informasi yang telah peneliti kumpulkan dan

telah di bahas di bab 3 mengenai teori tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kekuatan yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Gowa ialah sebagai berikut:

- a) Kebijakan pemerintah dalam membuka lapangan pekerjaan. Dikeluarkan beberapa kebijakan atau regulasi terkait lapangan pekerjaan oleh pemerintah yang ditetapkan oleh Kepala daerah yang dapat membantu masyarakat agar tingkat kemiskinan dapat berkurang juga pendapatan daerah bertambah. investasi secara besar-besaran akan dibuka pada tahun ini yang dimana dimulai dengan saling kerja samanya antara pihak cimory bogor dengan pemerintah Kabupaten Gowa yang tidak lain tujuan utama ialah membuka lapangan kerja bagi masyarakat dan sebagai peningkatan pendapatan daerah yang dimana sekitar 70 persen dari pekerjaannya ialah masyarakat sekitar
- b) Pinjaman modal hingga pelatihan usaha dari pemerintah. memberikan pinjaman modal bagi masyarakat yang ingin memulai usaha, namun tidak hanya diberikan modal juga pemerintah daerah memfasilitasi para calon pelaku usaha tadi dengan memberikan pelatihan yang dimana pengajarnya adalah orang yang telah terlatih atau pengajar yang memiliki pengalaman khusus dibidangnya masing-masing. Pelatihan yang diberikan ini disepakati oleh calon pelaku usaha dengan rentan waktu tertentu yang biasanya satu bulan, selain itu para calon pelaku usaha juga dituntut untuk membuat laporan mingguan agar pemerintah dapat melihat perkembangan masing-masing usaha.
- c) Penerapan kemajuan informasi dan teknologi. Pemerintah daerah membantu masyarakat untuk mempelajari teknologi yang dimana dapat meningkatkan pendapatan lebih bagi masyarakat juga usaha kecil yang dijalani. Selain itu kemajuan teknologi ini dapat membantu masyarakat dalam mengakses informasi potensi usaha ataupun informasi lainnya.

3.2. Kelemahan (Weakness)

Penulis melakukan pengukuran terhadap kelemahan Dinas Sosial dalam mengurangi kemiskinan. Faktor kelemahan ini merupakan hal-hal yang tentunya menjadi suatu penghambat suatu instansi dalam melaksanakan program kerjanya utamanya di pemerintah daerah sebagaimana yang telah dibahas diantaranya sebagai berikut

- a) Penerapan kebijakan pemerintah yang masih terhambat. Proses berjalannya kebijakan yang dikeluarkan juga memiliki hambatan salah satunya masih kurang melirikinya para investor luar untuk ikut bergabung dalam membantu membuka lapangan kerja secara besar di Kabupaten Gowa sehingga faktor tersebut menjadi salah satu alasan sehingga proses pembuatan lapangan kerja secara besar ini belum maksimal berjalannya
- b) Belum adanya kesadaran penuh pada sumber daya manusia akan rasa ingin berusaha. masih sangat banyak dari masyarakat yang memiliki inisiatif yang sangat kurang untuk bekerja ataupun membuat usaha yang dimana masyarakat lebih memilih untuk diam dan menunggu bantuan langsung dari pemerintah daerah, sehingga tradisi yang kurang baik ini terus menerus berlanjut sampai anak cucu mereka ikut dalamnya.

3.3. Peluang (Opportunities)

Penulis melakukan pengukuran terhadap peluang Dinas Sosial dalam mengurangi angka kemiskinan. Dari hasil penelitian terdapat beberapa faktor yang dimana termasuk juga peluang Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Gowa yaitu:

- a) Adanya dukungan dari pemerintah daerah. Keseriusan dari Pemerintah Kabupaten Gowa termasuk Dinas Sosial yang dimana bukan hanya memberikan bantuan tanpa mengarahkan

namun juga sampai membantu mempromosikan usaha dari masyarakat agar pendapatan perkapita dapat mengalami kenaikan tiap tahunnya. Industri Pemkab Gowa berhasil meraihnya atas inovasi yang dilakukan dalam pengembangan usaha telur asin menggunakan pembakaran media pasir. Pengembangan pengelolaan telur asin ini merupakan salah satu program utama dalam pengembangan kompetensi industri kecil menengah, dimana Pemkab Gowa telah memprogramkan OVOP (one village one product) yang memfokuskan pembinaan produk usaha kecil menengah dalam suatu wilayah baik kecamatan maupun desa/kelurahan.

- b) Kebudayaan. Dengan adat dan kebudayaan yang unik seperti beberapa kerajinan tangan serta makanan khas yang dibuat dari bahan rempah-rempah di daerah yang dimana hal tersebut selain menjadi budaya juga menjadi daya Tarik tertentu bagi para investor asing yang dimana salah satu contohnya akan dibuat desa budaya didalamnya akan menjalani pendampingan serta pelatihan khusus, namun sampai saat ini masih menjadi rencana oleh pemerintah daerah.
- c) Dukungan masyarakat. Masyarakat Kabupaten Gowa yang mendukung kebijakan pemerintah utamanya dalam hal membangun serta menaikkan pendapatan perkapita yang dimana memberikan timbal balik kepada masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi dan mengurangi angka kemiskinan dikarenakan hal tersebut.

3.4. Ancaman (Threats)

Dari hasil penelitian primer, sekunder dan hasil wawancara dengan Kepala Dinas, penulis mendapatkan informasi bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi ancaman dalam meningkatkan investasi daerah diantaranya:

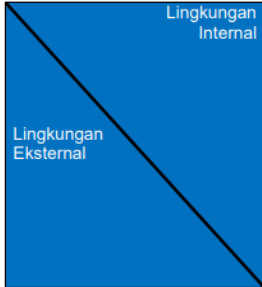
- a) Kurangnya lapangan kerja yang tersedia. hal ini yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa dari usaha kecil milik masyarakat sampai mengundang dan mencari investor agar lapangan kerja terbuka luas bagi masyarakat guna membantu masyarakat agar tingkat pengangguran berkurang serta mengurangi angka kemiskinan.
- b) Kurangnya kualitas tenaga kerja. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) utamanya masyarakat Kabupaten Gowa dimana masih kurangnya inisiatif untuk bekerja masih menanam budaya malas untuk kerja sehingga dikalahkan dengan tenaga asing. Jadi wajar saja para investor lebih tertarik untuk menarik tenaga dari luar dikarenakan kualitas yang berbeda jauh, hal ini sangat mempengaruhi para investor lain dalam menanam modal di Kabupaten Gowa juga melihat dari sisi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
- c) Gencarnya promosi investasi daerah lain. Masing-masing daerah memiliki berbagai cara untuk menarik para investor dalam melakukan investasi didaerahnya. Sehingga dengan gencarnya melakukan promosi investasi dapat membuat para investor lebih tertarik melakukan investasi didaerah tersebut.

3.5. Matriks Analisis SWOT

Dari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang telah diteliti oleh penulis, maka penulis menganalisis faktor-faktor tersebut sehingga dapat diperoleh alternative strategi yang tepat guna dalam meningkatkan investasi daerah

Tabel 1

Matriks SWOT Meningkatkan Investasi Daerah

 <p>Lingkungan Eksternal</p>	<p>Lingkungan Internal</p>	<p>Strength (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Pemerintah Dalam Membuka Lapangan Kerja 2. Pinjaman Modal Hingga Pelatihan Usaha dari Pemerintah 3. Penerapan kemajuan informasi dan teknologi (IT) 	<p>Weakness (W)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan Kebijakan Pemerintah yang Masih Terhambat 2. Belum Adanya Kesadaran penuh pada Sumber Daya Manusia (SDM) Akan rasa ingin berusaha
	<p>Opportunities (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Dukungan Dari Pemerintah Daerah 2. Kebudayaan 3. Dukungan Masyarakat 	<p>Strategi SO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Efektivitas dan Efisiensi kinerja pemerintah dalam membuka lapangan kerja secara luas 2. Pemanfaatan pinjaman modal serta pelatihan yang diberikan oleh pemerintah 3. Penerapan Informasi dan Teknologi dalam membantu masyarakat guna kemajuan usaha 	<p>Strategi WO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan daya Tarik budaya serta lebih mempromosikan daerah agar para investor asing banyak yang menanamkan modal 2. Mengevaluasi kebijakan pemerintah utamanya tentang distribusi bantuan ke masyarakat 3. Pengadaan Kendaraan Dinas dan sarana prasarana pendukung
	<p>Threats (T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya Lapangan Kerja yang Tersedia 2. Kurangnya Kualitas Tenaga Kerja 3. Gencarnya Promosi Investasi Daerah Lain 	<p>Strategi ST</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 2. Meningkatkan Realisasi serta mempermudah mobilitas pendistribusian bantuan 	<p>Strategi WT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperbaiki Iklim Investasi bagi para investor yang belum efektif dan efisien

Sumber: Diolah Peneliti berdasarkan hasil penelitian, tahun 2022

1. Strategi SO

- a) Efektifitas dan efisiensi kinerja pemerintah dalam membuka lapangan kerja secara luas serta inisiatif yang tinggi guna upaya mengundang investor asing untuk menanamkan modal yang besar agar terciptanya lapangan kerja yang luas bagi masyarakat
- b) Pemanfaatan pinjaman modal serta pelatihan yang diberikan oleh pemerintah
- c) Penerapan informasi dan teknologi dalam membantu masyarakat guna kemajuan usaha dengan cara mempromosi usaha serta terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam suatu pekerjaan

2. Strategi ST

- a) Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan diklat atau pelatihan guna meningkatkan kualitas sebagai aparatur yang baik dan memadai
- b) Meningkatkan realisasi serta mempermudah mobilitas pendistribusian bantuan secara merata

3. Strategi WO

- a) Meningkatkan daya tarik budaya serta lebih mempromosikan daerah agar para investor asing banyak yang menanamkan modal
- b) Mengevaluasi kebijakan pemerintah utama tentang distribusi bantuan ke masyarakat
- c) Pengadaan kendaraan dinas dan sarana prasarana pendukung peningkatann investasi

4. Strategi WT

- a) Memperbaiki iklim investasi bagi investor yang belum efektif dan efisien. Perbaikan Iklim Investasi dapat dipengaruhi oleh faktor kebijakan, kelembagaan, sumber daya aparatur, infrastruktur, sampai dengan masyarakat dalam melaksanakan usaha.

Dengan memperbaiki iklim investasi dengan konsistensi yang baik, mampu menjadikan daya tarik investasi lebih meningkat

3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam mencapai tujuan utama Dinas Sosial yang dimana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan religious ialah dengan melaksanakan komitmen sesuai dengan visi dan misi daerah terutama visi dan misi ini yang dimana memiliki fungsi utama ialah memberikan kesejahteraan pada seluruh lapisan masyarakat utamanya di Kabupaten Gowa, yang dimana semua itu tak terlepas juga dari peningkatan kualitas pelayanan berbeda dengan provinsi Jambi yang mengutamakan Bappeda yang bertanggung jawab untuk mengentaskan kemiskinan (Soleh:2018). Selain itu juga seluruh kebijakan juga akan diterapkan sesuai dengan kepastian hukum yang berlaku. Dengan komitmen bersama antara keseluruhan unsur pemerintah daerah dan seluruh komponen unit kerja Dinas Sosial yang melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam suatu kualitas pelayanan, maka akan senantiasa berdampak baik juga untuk memberikan kesejahteraan pada seluruh masyarakat. Namun Dinas sosial tidak melakukan penataan kawasan kumuh yang seperti dilakukan di Kota Buma guna membantu mengentaskan kemiskinan (Ramadani:2021)

Dalam upaya mengurangi angka kemiskinan terdapat faktor penghambat dan pendukung yang mempengaruhi kualitas pelayanan Dinas Sosial dalam mengurangi angka kemiskinan tersebut. faktor penghambat yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Gowa dalam mendistribusikan bantuan sosial tunas (BST) dalam prosesnya terdapat beberapa hambatan salah satunya dari data yang dari pusat kadang mengalami perbedaan pada data di daerah yang dimana mengakibatkan bantuan yang dimana harusnya terbagi rata tersebut akhirnya ada beberapa oknum masyarakat yang mendapat bantuan dua kali dan ada juga yang sama sekali tidak mendapatkan bantuan dari pusat. Hal ini membuat Dinas Sosial untuk kembali bekerja ekstra dengan menyamakan data dari pusat agar bantuan dapat terbagi secara rata, hambatan lainnya adalah tidak lengkapnya kelengkapan berkas atau syarat yang harus dilengkapi masyarakat kemudian hambatan terakhir terdapat pada mobilitas pendistribusian penyaluran bantuan terkendala kurangnya sarana dan prasarana. Sedangkan faktor pendukung Dinas Sosial adalah datangnya investor asing dengan skala besar sehingga dapat dapat membuka lapangan kerja secara luas bagi masyarakat hal tersebut dapat membantu menaikkan pendapatan perkapita tiap tahunnya. Selain mengundangnya investor asing pemerintah daerah juga memberikan bantuan modal usaha serta pelatihan sehingga masyarakat lebih terarah dalam membangun usahanya.

Dalam mengatasi hambatan tersebut Dinas sosial melakukan upaya dalam mendistribusikan Bantuan Sosial Tunai (BST) diantaranya melakukan pinjaman modal hingga pelatihan usaha dari pemerintah, mengembangkan desa budaya sebagai daya tarik investor, melakukan kerjasama dengan cimory dalam membuka lapangan pekerjaan, dan melakukan rencana rancangan anggaran kearah pelatihan serta diklat guna peningkatan mutu sumber daya manusia dengan lebih banyak hal ini sama dengan strategi pemberdayaan masyarakat produktif, dan membuat unit wisata, yang bisa menyokong pendapatan asli desa (Budiningsih:2019).

4.7. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Penulis menemukan salah satu faktor yang menghambat pemerintah daerah dalam penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Gowa adalah munculnya pandemi Covid-19 yang justru memperparah kondisi masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Selain itu, masyarakat yang selangkah di

atas garis kemiskinan jadi miskin akibat adanya pandemi Covid-19. Sehingga laju pertumbuhan angka kemiskinan semakin meningkat di Kabupaten Gowa.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Strategi pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan dengan membuat kebijakan dengan menekankan lapangan pekerjaan dan membantu usaha menengah sehingga pendapatan perkapita masyarakat dapat meningkat pemerintah juga menekankan akan pentingnya kemajuan informasi dan teknologi hal tersebut dapat memberi efektivitas dan efisiensi dalam pekerjaan. Hambatan yang ditemui yaitu masyarakat belum bisa melengkapi persyaratan faktor pendukung adanya investor asing membuka lapangan kerja yang lebih banyak. faktor pendukung Dinas Sosial adalah datangnya investor asing dengan skala besar sehingga dapat membuka lapangan kerja. Upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Gowa dalam mendistribusikan Bantuan Sosial Tunai beberapa upaya pemerintah saat ini dengan Pinjaman modal hingga pelatihan usaha dari pemerintah dengan pengawasan pemerintah daerah selanjutnya pemerintah sedang mengembangkan desa budaya sebagai daya Tarik investor asing terdapat wilayah yang di tunjuk oleh pemerintah yang akan di bangun sebagai desa budaya hal tersebut dapat membuka lapangan kerja serta menampilkan budaya Kabupaten Gowa. Saat ini juga sedang dibangun cimory upaya kerja sama pemerintah daerah dengan pihak cimory yang terletak di dataran tinggi dengan ketentuan para pekerja sekitar 70 persen dari keseluruhan pekerja adalah masyarakat Kabupaten Gowa. Guna meningkatkan pelaksanaan pengurangan angka kemiskinan oleh Dinas sosial diarsanakan untuk lebih banyak melibatkan langsung masyarakat guna membangun keaktifan masyarakat agar dapat lebih banyak berkontribusi dan saling bekerjasama, lebih banyak memanfaatkan sistem informasi dan teknologi, dan memberikan pelatihan rutin guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam hal ini masyarakat serta diklat yang diadakan bagi para aparatur sipil.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga memiliki keterbatasan dalam bahasan penyebab kemiskinan terjadi di masyarakat karena banyak masyarakat yang enggan untuk berterus terang.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi dan pembahasan serupa berkaitan Strategi pemerintah daerah dalam mengurangi angka kemiskinan di kabupaten Goa Provinsi Sumatera Selatan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa dan Kepala Dinas Sosial beserta jajarannya serta masyarakat yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Prenada Media Group

- David, Fred R, 2004. Manajemen Strategis Konsep-konsep Edisi ke-9, Ahli bahasa Kresno
- David, Fred. 2011. Manajemen Strategis. Jakarta: Salemba Empat.
- Hafsah, Mohammad Jafar.1999. Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaaan Masyarakat. Institute for Religius and Institutional Studies (IRIS) Press. Bandung.
- Hunger, J. David dan Wheelen, Thomas L., 2003. Manajemen Strategis, ANDI, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Moleong, 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung
- Rangkuti, Freddy, 2006. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis, PT Gramedia
- Rangkuti, Freddy. 2014. Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Supriatna, Tjahya.1997. Birokrasi, Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan. Bandung
- Sugiyono, 2004. Metode Penelitian Administrasi. Bandung
- Suradinta, Ermaya. 1996. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta.
- Todaro, Michael P. 1994. Pembangunan Ekonomi di dunia Ketiga. Edisi Keempat Jilid
- Jakarta: Erlangga Winardy, Nisar. 1997. Manajemen Strategi: Bandung: CV. Mandiri Maju
- Sutopo, 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif, Sebelas Maret University Press, Surakarta.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1999. Kemiskinan: Teori, Fakta dan Kebijakan, Impac, Jakarta.

